

NEGERI SIPIL – PENYIDIK PEGAWAI

2018

PERDA KOTA MAGELANG NO. 14, LD 2018/NO. 14 TLD 82 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-19

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.19 TAHUN 2018 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

ABSTRAK : — bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan, ketentraman, perlindungan terhadap masyarakat, dan menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum di Kota Magelang dalam penegakan Peraturan Daerah, perlu penyidik pegawai negeri sipil daerah yang profesional dan berintegritas dan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di Daerah yang efektifitas dan efisien, serta dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak relevan untuk diimplementasikan sehingga perlu diganti

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU Nomor 2 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016;

— Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sangat strategis dalam penegakan peraturan perundang-undangan di Daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang diberlakukan dalam skala Nasional. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin terwujudnya kinerja PPNS tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan berintegritas perlu adanya penguatan baik secara personal maupun secara kelembagaan, sehingga harus dibentuk payung hukum dan diberikan ruang dalam pelaksanaan koordinasi antar PPNS berwenang dalam penegakan Peraturan Daerah dan penegakan Peraturan Walikota dengan PPNS berwenang dalam menegakan Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya dalam melaksanakan tugasnya.

— Kedudukan, tugas, dan wewenang, Sekretariat PPNS, Hak dan kewajiban, Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian, Kode etik profesi PPNS, Pendidikan dan pelatihan, Sumpah / janji dan pelantikan, Penyidikan, Pembinaan, Pakaian dan atribut, Pembiayaan, Ketentuan penutup

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 18 Desember 2018.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 18 Desember 2018 Nomor 14. (Lembar Daerah No. 14 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 14/2018).
 - Penjelasan : 5 hlm